

KONDISI UMUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI TAHUN 2022

Uraian/Item	Februari 2022 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	3.477,74
- Angkatan Kerja :	2.682,84
# Bekerja	2.553,06
# Pengangguran	129,78
- Bukan Angkatan Kerja	794,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,14%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,84%

Sumber Data: BPS Provinsi Bali

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) TAHUN 2022

KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2022	KETERANGAN
1	2	3
KABUPATEN JEMBRANA	2.563.363,76	
KABUPATEN BULELENG	2.542.312,33	
KABUPATEN TABANAN	2.643.778,66	
KABUPATEN BADUNG	2.961.285,40	
KOTA DENPASAR	2.802.926,00	
KABUPATEN GIANYAR	2.656.009,00	
KABUPATEN BANGLI		- Upah minum yang berlaku yaitu upah minimum provinsi
KABUPATEN KLUNGKUNG	2.540.848,00	
KABUPATEN KARANGASEM	2.555.470,00	
UMP BALI	2.516.971,00	

Sumber Data

1. UMP: Keputusan Gubernur Bali Nomor 779/03-M/HK/2021 tentang (Tanggal 18 Nopember 2021)
2. UMK: Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Tanggal 30 Nopember 2021)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2022**

1. APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja
III	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
a	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
b	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
1	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
a	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

2. Alokasi APBN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2
I	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas
2	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas
3	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas
4	Kegiatan Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

II	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
1	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja
III	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
1	Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2	Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
IV	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
1	Kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos)
3	Kegiatan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ida Bagus Ngurah Arda
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE